

**PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA
DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.**

Dicky Iskandar¹, Suratno², Widarto Rachbini³
Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila¹²³
Email : dickydicy@gmail.com

(Received: 10-10-2019; Reviewed: 05-01-2019 Revised: 15-01-2019; Accepted: 12-03-2019; Published: 30-04-2019)

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the effects of deferred tax assets, board of commissioners structure, institutional ownership, and deferred tax assets that were moderated by the board of commissioners structure and institutional ownership of earning management. The data used in this study was obtained through documentation collected on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2013 to 2017. The sampling method used in this study was purposive sampling method and using 108 of research data samples and also using multiple regression data analysis methods on consumer goods manufacturing sub-sector companies during the study period. The results of this study indicate a significant effect of deferred tax assets on earning management, and institutional ownership of earnings management. However, board of commissioners structure does not significantly influence earnings management. The board of commissioners structure is able to moderate the relationship of deferred tax assets to earning management, but institutional ownership is not able to moderate the relationship between deferred tax assets and earning management.

Keywords: Deffered Tax Asset, Board of Commisioner Structure, Institutional Ownership, Eraning Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Aset Pajak Tangguhan, Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Aset Pajak Tangguhan yang dimoderasi oleh Struktur Dewan Komisaris serta Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi yang dikumpulkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan menggunakan data sampel sebanyak 108 sampel penelitian dan menggunakan metode analisis data regresi berganda pada perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods selama periode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen laba. Akan tetapi, Struktur Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba. Stuktur Dewan Komisaris mampu memoderasi hubungan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, namun Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.

Kata Kunci : Aset Pajak Tangguhan, Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba.

PENDAHULUAN

Fenomena praktik manajemen laba telah banyak terjadi belakangan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada banyak kasus mengenai praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan-perusahaan bonafit di level lokal bahkan internasional. Seperti contoh kasus pada perusahaan Toshiba yang terjadi di tahun 2015, seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan Toshiba merupakan

perusahaan asing internasional yang bonafit yang telah mempekerjakan lebih dari 200.000 karyawan diseluruh dunia dan merupakan salah satu dari 10 perusahaan terbesar di Jepang.

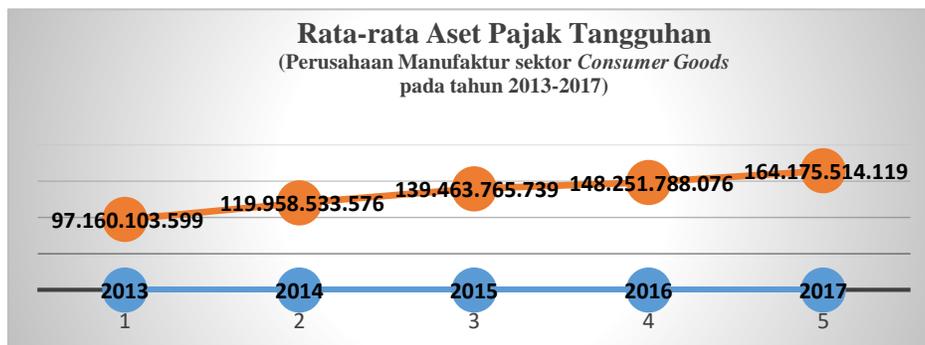
Kasus serupa juga pernah terjadi pada perusahaan lokal PT. Kimia Farma, Tbk pada tahun 2002 & PT. Indofarma, Tbk pada tahun 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, 2002), diperoleh bukti bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk., berupa kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan, dimana dampak kesalahan tersebut mengakibatkan *overstated* laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32,7 miliar.

Fenomena-fenomena tersebut diatas menunjukkan terjadinya manajemen laba dalam sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen laba salah satu diantaranya adalah dari sisi perpajakan yaitu aset pajak tangguhan.

Secara umum pelaporan keuangan pada perusahaan publik menurut akuntansi komersial harus mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), sedangkan pelaporan perpajakan mengacu pada PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan). Perbedaan standar tersebut mengharuskan adanya koreksi yang disebut koreksi fiskal pada pelaporan keuangan.

Koreksi fiskal mengakibatkan adanya selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) yang dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual (Fitriany, 2016). Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif, Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan.

Menurut Fitriany (2016) aset pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merencanakan laporan keuangan, dimana aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dapat disebabkan oleh adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya nilai perusahaan yang memotivasi pihak perusahaan dalam melakukan manajemen laba sehingga jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*).



Gambar 1.1
Grafik Aset Pajak Tangguhan Pada Perusahaan Manufaktur
Consumer Goods Periode 2013 – 2017

Jika aset pajak tangguhan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba, maka hal lain yang dapat mengontrol suatu perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba yang sedang marak diperbincangkan dari dulu hingga kini adalah mengenai tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). *Corporate Governance* (CG) merupakan paradigma baru yang memiliki lima komponen utama untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham

tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders. Kelima prinsip tersebut adalah *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*.

Konsep *Corporate Governance* (CG) secara definitif diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar selalu menciptakan nilai tambah untuk semua stockholder dan stakeholdernya. Ada dua poin penting yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak stockholder dan stakeholder untuk memperoleh informasi akurat dan tepat waktu (*timeliness*) serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan semua informasi mengenai perusahaan (sulistyanto, 2015).

Jika mekanisme *Corporate Governance* tidak diterapkan dengan baik pada sebuah perusahaan, hal ini dapat memicu perusahaan untuk mengeluarkan informasi-informasi yang memberi dampak negatif terhadap harga saham, sehingga pemegang saham tidak dapat mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Implementasi CG yang kurang maksimal seperti inilah yang menjadi kelemahan perusahaan dan menyebabkan krisis berkepanjangan.

Pentingnya penerapan *Corporate Governance* bukan hanya merupakan aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong tingkat investasi di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara aset pajak tangguhan dengan manajemen laba, seperti pada penelitian Fitriany (2016) yang memperoleh hasil penelitian signifikan pada hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) yang memperoleh hasil penelitian yang serupa. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2017) dimana diperoleh hasil yang tidak signifikan pada hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *Corporate Governance* terhadap manajemen laba yang telah dilakukan oleh Muda, dkk (2017) mengemukakan hasil penelitian yang signifikan, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiyanto (2016). Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Marsha dan Ghazali (2017) ; Marsha dan Ghazali (2017) yang mengemukakan hasil tidak signifikan pada hubungan antara *Corporate Governance* terhadap manajemen laba.

Penelitian ini mengkaji seberapa besar pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* tahun 2013-2017.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi berganda. Kondisi yang diamati terkait dengan informasi praktik manajemen laba dengan beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu aset pajak tangguhan, struktur dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. Sampel yang diteliti adalah sebanyak 25 perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria sampling penelitian pada periode 2013-2017.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017, landasan teori yang dikumpulkan dengan cara membaca literatur, buku akuntansi dan manajemen keuangan, jurnal-jurnal, dan sumber lain yang menunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian mencakup uji kecocokan model (*Model Fit & Quality Indices*) yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data dan harus dilakukan sebelum melakukan uji *signifikansi path coefficients*. Pada uji kecocokan model (model fit) ini, terdapat 2 tahap pengujian, pertama adalah dengan melihat nilai *average path coefficient* (APC), *average R-Squared* (ARS), dan *average variances factor* (AVIF).

Tahap selanjutnya adalah dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (aset pajak tangguhan, struktur dewan komisaris, dan kepemilikan institusional) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (manajemen laba).

Setelah dilaksanakan berbagai metode pengujian tersebut di atas, maka selanjutnya dilaksanakan analisis atas model penelitian persamaan regresi linier berganda untuk mengetahui besaran determinatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan WarpPLs Versi 5.0 Adapun rangkuman hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut:

Path Coefisien dan P-Value		
Jalur	Path Coefficient (β)	P-Value
APT → MANLABA	0.14	0.07
DEKOM → MANLABA	-0.12	0.11
KI → MANLABA	-0.25	<0.01
APT * DEKOM → MANLABA	0.14	0.07
APT * KI → MANLABA	0.01	0.45

Sumber : data diolah (2018)

Keterangan :

APT : Aset Pajak Tangguhan

MANLABA : Manajemen Laba

DEKOM : Struktur Dewan Komisaris

KI: Kepemilikan Saham Institusional

Pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terkait pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba, menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Mengacu pada

teori *agency* adanya kepentingan masing-masing pihak baik *agent* maupun *principal* dapat menjadi motif utama adanya praktik manajemen laba, dan aset pajak tangguhan dapat menjadi salah satu celahnya.

PSAK No.46 mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan.

Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen seringkali dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Namun, resiko yang akan ditanggung oleh sebuah perusahaan jika hal tersebut dilakukan juga tentunya akan sangat besar karena perusahaan harus membayarkan jumlah yang lebih besar. Selain itu resiko lain seperti : (1) pengakuan pajak tangguhan bersifat sementara, karena ditahun berikutnya selisih tersebut menjadi kewajiban PPh yang harus dibayar, maka liabilitas pajak tangguhan diakui sebagai utang PPh, (2) Bagi perusahaan yang mengakui aset pajak tangguhan maka transaksi akan menggantung dan menumpuk. Pada tahun berikutnya ada pengakuan aset pajak tangguhan yang baru, maka akan semakin menumpuk, (3) karena pengakuan aset maupun liabilitas pajak tangguhan yang terus meningkat dan tak kunjung dihapus maka akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak kredibel sehingga akan menjadi perhatian pengguna yang mempunyai keuntungan.

Hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan terkait ketidak handalan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2016), Hakim (2015), serta Scott & Campbell (2016) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nigsih (2017) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pengaruh struktur dewan komisaris terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terkait pengaruh struktur dewan komisaris terhadap manajemen laba, menunjukkan bahwa struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan dapat diinterpretasi bahwa banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak mampu mencerminkan bahwa semakin baik peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol dalam sebuah perusahaan untuk tidak melakukan praktik manajemen laba.

Dengan melihat hasil tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa besarnya komposisi dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan tidak menjamin transparansi perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris independen yang lebih banyak tentunya dapat menambah keyakinan para investor akan penerapan sistem tata kelola (*corporate governance*) yang baik dalam perusahaan tersebut namun tidak menjamin bahwa didalam perusahaan tersebut tidak terjadi praktik manajemen laba. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan merupakan elemen penting dalam proses monitoring atau pengewasan terhadap kinerja manajemen salah satunya untuk menghindari jika ada dari salah satu baik *principal* maupun agen yang hendak bertindak atas kepentingan pribadi.

Mengacu pada teori *agency*, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan maka semakin baik untuk mekanisme kontrol perusahaan, namun berdasarkan data yang ada jika dilihat dari jumlah dewan komisaris independen rata-rata yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* ini adalah sekitar 37% jumlah komisaris independen dari keseluruhan jumlah

dewan komisaris atau 1:3, hal ini dapat menjadi salah satu alasan tidak adanya pengaruh terhadap manajemen laba dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahiswari dan Nugroho (2014), Jannah (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, serta tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumaat (2013), Larastomo (2016) Muda dkk (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap manajemen laba

Berdasarkan hasil uji hipotesis terkait pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Melihat nilai koefisien jalur yang positif maka pengaruh kepemilikan institusional

terhadap manajemen laba bernilai positif artinya bahwa semakin besar persentase kepemilikan saham institusional dalam sebuah perusahaan maka semakin mampu mengontrol kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba.

Sejalan dengan teori signaling, kepemilikan saham institusional ini dinilai mampu menjadi mekanisme kontrol eksternal perusahaan atas kegiatan ataupun kebijakan yang mungkin akan diambil oleh manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menghindarkan manajemen dan para pemangku kepentingan untuk bertindak atas kepentingan pribadi. Investor institusional sebagai *principal* atau pemilik perusahaan harus mempekerjakan *agent* atau manajer untuk mewakili mereka dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan mempercayakan pembuatan putusan perusahaan yang dilakukan demi kepentingan pemegang saham. Hal ini memungkinkan manajer memiliki informasi lebih mengenai operasi perusahaan sehari-hari dibandingkan pemegang saham. Ketimpangan informasi ini menimbulkan risiko bagi pemegang saham. Pemegang saham berkeinginan untuk memaksimalkan laba atas investasi mereka, sedangkan manajer memiliki keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan oleh pemegang saham untuk melihat apakah tindakan yang diambil manajer dalam kegiatan operasional perusahaan sudah sejalan dengan kepentingan perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, keberadaan investor institusional untuk mengawasi perilaku manajemen akan semakin efektif. Hal ini diharapkan dapat mencegah manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kepentingannya dengan melakukan tindakan manipulasi atau manajemen laba, baik akrual maupun riil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kumaat (2013), Sudiyanto (2016), Dananjaya dan Ardiana (2016), Jannah (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. serta tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2013), Hidayanti dan Paramitha (2014), Mahariana dan Ramantha (2014), Marsha dan Ghazali (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Struktur dewan komisaris memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terkait pengaruh struktur dewan komisaris memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa struktur dewan komisaris mampu memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam struktur organisasi sebuah perusahaan dianggap sangat penting karena mampu mendorong pengawasan terhadap kebijakan perusahaan yang berpengaruh terhadap minimalisasi praktik manajemen laba.

Komisaris independen secara teori dipandang berpengaruh dalam mengurangi *agency* konflik dan *agency cost* dalam perusahaan serta dalam peningkatan nilai transparansi perusahaan walaupun secara

langsung hubungan antara struktur dewan komisaris menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau dengan kata lain bahwa struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba namun berdasarkan hasil penelitian struktur dewan komisaris dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol internal dalam pengawasan terhadap praktik manajemen laba yang mungkin dapat terjadi.

Adanya PSAK 46 yang mengatur tentang pajak tangguhan tidak menjamin perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba. Aset pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang menyebabkan perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan antara laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut pajak. Hal ini dapat membuat manajemen memanfaatkan celah untuk melakukan manipulasi besarnya nilai aset pajak tangguhan yang dimiliki. Disinilah peran penting para komisaris independen dituntut agar dapat meminimalisasi kebijakan-kebijakan yang mungkin akan diambil oleh manajemen untuk kepentingan pribadi atau perilaku oportunistiknya.

Walapun berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa, persentase dan perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris yang ada belum mampu memenuhi standar yang seharusnya namun semakin banyak jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin baik pula untuk sebuah perusahaan.

Struktur dewan komisaris dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai variabel pemoderasi dengan jenis pure moderator dimana $b_3 = 0$ dan $b_5 \neq 0$, atau ketika variabel moderasi diuji dengan dengan variabel dependen menunjukkan tidak ada hubungan atau pengaruh namun memiliki pengaruh saat diuji sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil uji hipotesis terkait pengaruh kepemilikan institusional memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba walaupun secara teoritis mengacu ke teori *signaling* bahwa kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme kontrol eksternal bagi perusahaan dalam hal praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh perusahaan karena kebijakan diskresioner namun dalam penelitian ini kepemilikan saham institusional dinyatakan belum mampu memoderasi hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Hal tersebut dikarenakan kepemilikan saham institusional dalam sebuah perusahaan khususnya perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* hanya berkisar 12,57 persen jika dibandingkan dengan kepemilikan saham lainnya. Akibat karena jumlahnya yang sedikit maka para investor saham institusional sebagian besar sebagai pemilik sementara perusahaan dan lebih terfokus kepada laba jangka pendek (*current earnings*)

Kepemilikan institusional dinilai mampu menyebabkan adanya peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kebijakan perusahaan yang mungkin akan diambil oleh manajemen, serta sebagai mekanisme kontrol eksternal perusahaan kepemilikan saham institusional juga dianggap dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer terkait keuntungan dari setiap peluang perusahaan. Namun, disisi lain kepemilikan institusional juga dipandang mempunyai pengaruh yang negatif terhadap praktik manajemen laba, karena semakin kecil persentase kepemilikan institusional maka semakin besar pula kecenderungan pihak manajer dalam mengambil kebijakan akuntansi tertentu untuk memanipulasi pelaporan laba, tetapi kepemilikan institusional yang terlalu tinggi juga dapat membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

Kepemilikan saham institusional dalam hubungannya terhadap manajemen laba memiliki hubungan yang signifikan, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba, atau $b_3 \neq 0$ dan $b_5 = 0$, oleh karena itu kepemilikan saham institusional dinyatakan bukan sebagai variabel moderator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Pajak Tangguhan secara langsung berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai aset pajak tangguhan suatu perusahaan maka semakin besar pula potensi sebuah perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba, dan sebaliknya. Aset Pajak Tangguhan dapat menjadi celah bagi manajer suatu perusahaan untuk melakukan praktek manajemen laba, karena manager tersebut dapat menentukan sendiri kebijakan akuntansinya dalam penilaian aset pajak tangguhan di laporan keuangan.

Struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki arti bahwa semakin banyak atau sedikitnya komposisi komisaris independen dalam sebuah perusahaan belum mampu dijadikan sebagai indikator apakah suatu perusahaan tersebut melakukan praktek manajemen laba. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan yang memiliki komisaris independen belum dapat meyakinkan para calon investor untuk menginvestasikan dananya ke dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar persentase kepemilikan saham institusional dalam sebuah perusahaan maka semakin baik pengawasannya terhadap suatu perusahaan, sehingga mampu memperkecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktek manajemen laba.

Struktur dewan komisaris mampu memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dimana dengan adanya komisaris independen mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap praktek manajemen laba sehingga dapat mengurangi agency konflik dan agency cost dalam perusahaan serta dapat meningkatkan nilai transparansi perusahaan.

Kepemilikan institusional mampu memoderasi secara positif pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dimana kepemilikan institusional secara positif dapat menumbuhkan peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap praktek manajemen laba sehingga dapat mengurangi perilaku opportunistik manajer dikarenakan kepemilikan institusional memiliki harapan yang besar terkait keuntungan dari setiap peluang perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah hasil penelitian hanya terbatas pada jumlah sampel yang diteliti yaitu hanya sebanyak 25 perusahaan manufaktur sub-sektor *consumer goods* selama lima tahun periode penelitian. Sehingga untuk sampel pada sektor lainnya mungkin menunjukkan hasil yang berbeda.

Variabel yang digunakan untuk memprediksi kebijakan kinerja perusahaan hanya terbatas pada aset pajak tangguhan, struktur dewan komisaris, dan kepemilikan institusional, namun masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Variabel pemoderasi hanya terbatas pada struktur dewan komisaris, dan kepemilikan institusi yang di proksikan dengan proporsi komisaris independen dan jumlah persentase kepemilikan secara keseluruhan.

Saran dan implikasi hasil penelitian secara teoritis dan praktis bagi para pelaku bisnis dan praktisi selanjutnya adalah bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam meneliti hubungan aset pajak tangguhan terbukti dapat mendeteksi praktek manajemen laba dalam suatu perusahaan. Diharapkan variabel aset pajak tangguhan dapat dijadikan penelitian baru untuk meneliti variabel lain selain manajemen laba, sehingga dapat menghasilkan penelitian atau temuan baru bagi dunia akademik. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian yang digunakan. Objek penelitian dapat menambahkan objek perusahaan manufaktur, perbankan, perusahaan dagang, perusahaan real estate, dan/atau perusahaan jasa sub sektor lainnya.

Bagi para regulator dan pelaku bisnis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau tolak ukur untuk menilai suatu perusahaan dalam mendeteksi kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktek manajemen laba. Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu analisa untuk melakukan tindakan dan kebijakan bisnis bagi perusahaan terhadap praktek manajemen laba.

REFERENSI

- Dananjaya, Dewa Gede Yudha dan Ardiana, Putu Agus., 2016. Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.2. Mei (2016): 1595-1622
- Fitriany, Lucy Citra 2016. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). *JOM Fekon* Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.
- Hakim, Arif Rachmad., dan Praptoyo, Sugeng. 2015. Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 7 (2015).
- Hidayanti, Ery., Paramitha, Ratna Widjayanti Dahniar. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap praktik Manajemen Laba Riil pada perusahaan Manufaktur. *Jurnal Wiga* Vol. 4 No.2, September 2014.
- Irawan, Wisnu Arwindo. 2013. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jannah, Avin Mar'atul. 2017. Pengaruh Aset Perusahaan, Pajak Penghasilan, dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, No.9, September 2017.
- Kumaat, Lusye Corvanty. 2013. *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17, No.1 Januari 2013, hlm. 11-20.
- Larasmoto, Juoro, et al. 2016. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 Halaman 63 – 74.
- Mahariana, I Dewa Gede Pinggan., Ramanta, I Wayan. 2014. Pengaruh Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 519-528.
- Mahiswari, R., Nugroho, P, I. 2014. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 17, No.1.
- Marsha, Felicia., Ghozali, Imam. 2017. Pengaruh Ukuran Komite Audit, Audit Eksternal, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Kepemilikan

Institusional Terhadap Manajemen Laba . (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Diponegoro Journal Of Economics*. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, Halaman 1-12 ISSN (Online): 2337-3814.

Muda, Iskandar., Maulana, Weldi., Siregar, Hasan Sakti., Indra, Naleni. 2017. *The Analysis of Effects of Good Corporate Governance on Earnings Management in Indonesia with Panel Data Approach*. Iran. Econ. Rev. Vol. 22, No. 2, 2018. pp. 599-625.

Ningsih, Fatimatu Cahya., 2017. *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Scott, William R. (2012). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. Canada: Pearson.

Sudiyanto, Yayan., 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensinya Terhadap Nilai Perusahaan.

(Studi Pada Perusahaan yang Melakukan *Right Issue* di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*.

Sulistiyanto, H. Sri. 2008. "*Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris*". Jakarta: Grasindo.